

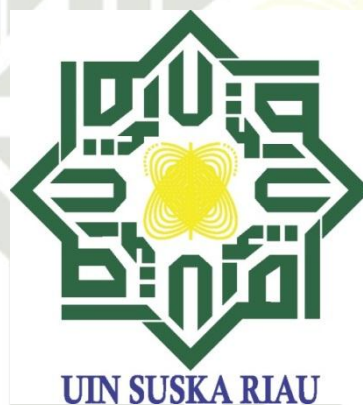
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DISAAT JAM KERJA
BERDASARKAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**(Studi Kasus di PT Berlian Inti Mekar
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

**RENDY ERIANTO
NIM. 11527102274**

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"** yang ditulis oleh:

Nama : Rendy Erianto

NIM : 11527102274

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Joni Alizon, SH.,MH
NIK. 130217041

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DI SAAT JAM KERJA BERDASARKAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*, yang ditulis oleh :

Nama : **RENDY ERIANTO**
 NIM : 11527102274
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M. Ag

Sekretaris

Joni Alizon, MH

Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II

Firdaus, SH., MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M. Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Rendy Erianto, (2021): Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

Bagi tenaga kerja perempuan dengan adanya peraturan didalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa Pekerja/Buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Fakta yang tampak, di PT Berlian Inti Mekar tidak menyediakan fasilitas khusus untuk keberlangsungan proses menyusui. Penelitian ini memfokuskan kepada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat jam kerja berdasarkan pasal 83 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan faktor penghambat penerapan hak tenaga kerja perempuan tersebut dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti Mekar.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan pengamatan serta di lanjutkan dengan wawancara pada PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun kabupaten Siak tentang penerapan terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat jam kerja. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai data yang di peroleh kemudian di analisa. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di saat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini peneliti dapati terjadi berdasarkan dua faktor: (1).faktor internal, yang meliputi: (a).kurangnya kesadaran perusahaan, (b).keterbatasan ruang fasilitas bangunan, (c). minimnya jumlah tenaga kerja, (d).kurangnya informasi, (e). kurangnya komunikasi, (f). kurangnya pemahaman hukum. (2).faktor eksternal, yang meliputi: (a). kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenaga kerja dan Transmigrasi, (b).tidak adanya penerapan sanksi

Kata kunci: Implementasi, Hak tenaga kerja perempuan, Faktor penghambat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berhasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Saprianto, dan Ibunda Erita yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Joni Alizon, SH, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum A dan kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada Kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal telah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2021

Rendy Erianto
NIM.11527102274

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 13 |
| C. Rumusan Masalah | 13 |
| D. Tujuan Penelitian | 14 |
| E. Manfaat Penelitian | 14 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 20 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Siak | 20 |
| B. Kondisi Sumber Daya Alam Kabupaten Siak | 23 |
| C. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak | 24 |
| D. Sejarah Singkat Kecamatan Dayun | 25 |
| E. Sejarah Singkat PT Berlian Inti Mekar | 27 |
| BAB III TINJAUAN TEORITIS | 29 |
| A. Teori Negara Hukum | 29 |
| B. Teori Implementasi | 33 |
| C. Teori Ketenagakerjaan | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | 52 |
| B. Faktor Penghambat Penerapan Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak | 61 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

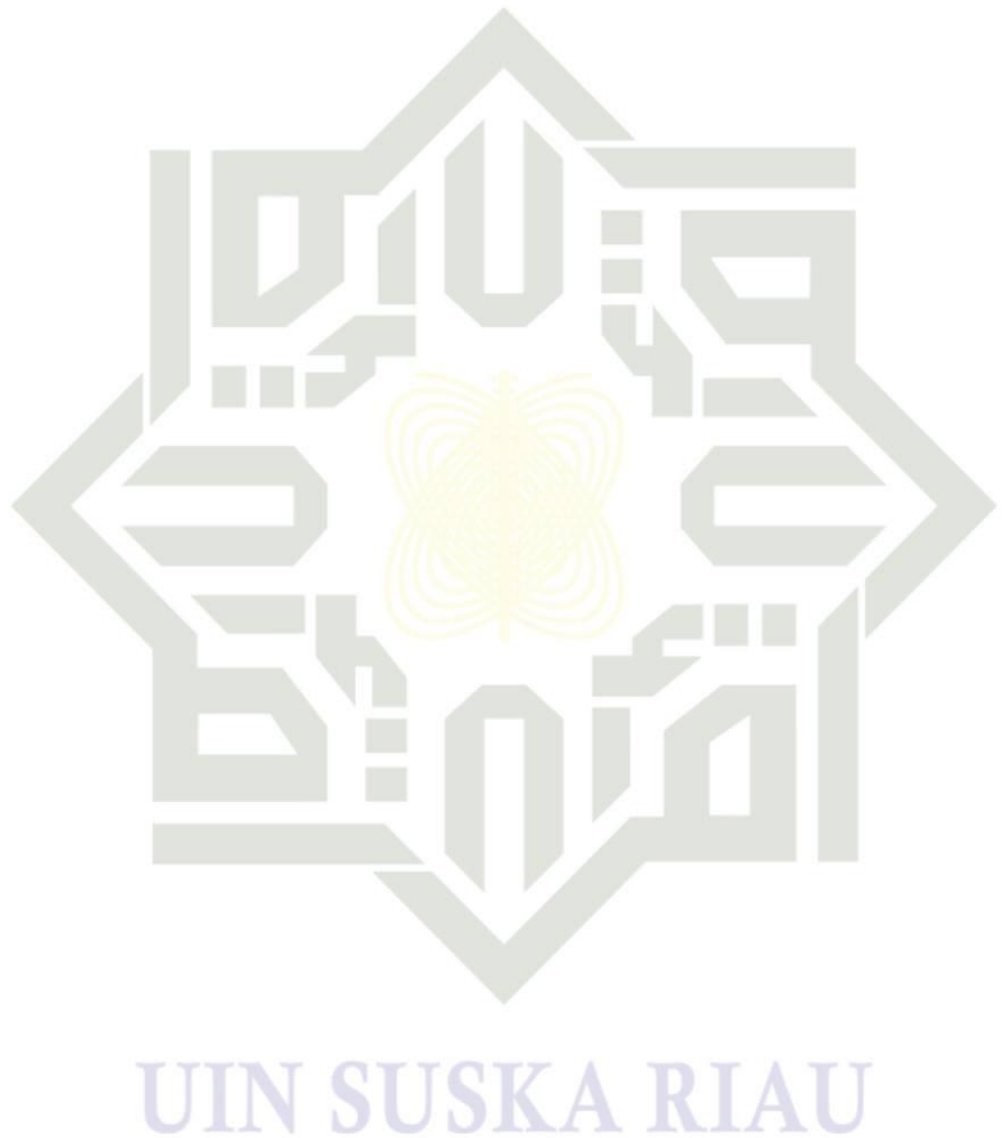
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Populasi dan Sample | 16 |
|-------------------------------------|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sudah sejak lama memiliki peran ganda, sebagai ibu yang merawat suami dan anak-anak juga sebagai pekerja di luar rumah. Perempuan yang bekerja diluar rumah dewasa ini juga merambah ke berbagai profesi, bahkan hampir setara dengan laki-laki, mulai dari yang bekerja kasar sampai di balik meja. Sesuai kodratnya, perempuan diberi kelebihan untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Sejatinya sebagai ibu, perempuan yang dikatakan makhluk lemah, bahkan lebih dituntut di bandingkan laki-laki karena ia mampu bekerja sebagai apapun sembari mengurus keluarga¹. Dengan peran ganda tersebut para perempuan harus menghadapi beberapa potensi konflik. Diantara konflik tersebut ialah peran konflik perempuan sebagai pekerja, tanggung jawab sosial, konflik terkait kinerja dan produktivitas serta peran laktasi atau menyusui.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan sebuah bisnis, maka diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja atau buruh. Sehingga tenaga kerja atau buruh merasa aman dan nyaman dalam bekerja.²

¹ Tagar News, "Perempuan Pekerja Usia Produktif Dilema Antara Bekerja Dan Menyusui Bayi", diakses dari <http://www.tagari.id/>, pada tanggal 05 September 2019 pukul 20.49

² Adi Pranata Saputra, "perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Pelabuhan Syngai Duku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", diakses dari <http://Repository.uin-suska.ac.id>, pada tanggal 17 September 2019 pukul 15.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pabrik atau suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah dari hasil produktivitas yang dilakukannya. Jika dilihat dari segi ekonomi, tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta dalam proses produksi dan menghasilkan barang dan jasa.³

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja menurut undang-undang ini meliputi “Tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubungan kerja dengan alat produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan di atas adalah ia bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah”.⁴

Sedangkan dalam pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerjaja adalah “Setiap orang laki-laki maupun wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.⁵

³ Poartadirejo, *Menajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal.220

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.9

⁵ Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan diatas, dengan sangat jelas dan menyebut secara detail bahwa tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan dan orang yang akan melakukan pekerjaan (masih mencari pekerjaan).⁶

Seterusnya mengenai pengertian tenaga kerja yang tertera didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁷

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh, memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan permasalahan ketenagakerjaan di Negara kita sangatlah kompleks. Permasalahan tersebut bisa muncul dari dalam perusahaan atau bahkan bisa muncul dari tenaga kerja atau buruh itu sendiri.

Pada abad ke XII Thomas Aquinas mempertegas, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya. Sebagai konsekuensi logis dari itu, maka perlu kestabilan dalam masyarakat, sehingga perlu kekuasaan sebagai pengaturnya.⁸ Pemerintah selaku pembina, pengawas dan penindakan hukum

⁶ Lalu Husni, *Loc. Cit.*

⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

melaksanakan aturan hukum dengan hati-hati mengingat posisi pengusaha dan pekerja merupakan aset potensial bagi negara, sekaligus subyek pembangunan nasional yang berkedudukan sama dihadapan hukum. Aturan hukum merupakan pedoman bagi tingkah laku, wajib dipatuhi para pihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepatuhan bukan merupakan paksaan, melainkan budaya taat terhadap ketentuan hukum.⁹

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan harus berdasarkan kepada dua aspek :¹⁰

Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (heterotom) dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian dan mempunyai nilai mamfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Hukum keteagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan yang sangat lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha yang cukup mapan. Hukum memberi mamfaat bagi pekerja yang kurang beruntung, antara lain seperti tingkat kesejahteraan, standar pengupahan serta syarat kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan

⁹ Ibnu syuja'i, *hukum ketenagakerjaan atau perburuhan*, hal.1, di akses dari <http://www.academia.edu/> pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 00.27

¹⁰ Krismena Natalina Panjaitan, *Pembinaan Karier Ketenagakerjaan Dalam Perbankan* (Semarang: Diponegoro, 2010), hal.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

makna keadilan menurut ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian pula ketentuan pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kedua, hukum normatif pada tingkat implementasi memberikan kontribusi dalam bentuk pengawasan melalui aparat penegak hukum dan melaksanakan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum.¹¹

Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti kita membicarakan hak-hak asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil.¹² Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas/terpisah dari diri pekerja itu akan menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Pengeertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut.¹³ Bagi H.L.A Hart, hak dalam arti modern itu baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia.

¹¹ *Ibid*, hal. 17.

¹² Pius A Pratanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal.48

¹³ DR. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asai Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hal.129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam pandangan Hart, keinsyafan akan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakui hak-haknya.¹⁴ Teori yang paling sering muncul dalam sumber hak manusia, ialah bahwa keistimewaan manusia (sebagai dasar hak-hak) terletak dalam wujud manusia sendiri, sebagaimana didapati olehnya melalui pikirannya.¹⁵ Sementara menurut Franz Magniz-Suseno, sesuatu menjadi hak saya, apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu dapat diberikan kepada saya dan apabila orang lain wajib untuk memberikan apa yang saya tuntut itu.¹⁶ Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasiannya dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.¹⁷

Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.¹⁸

Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut memang untuk mensejajarkan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kejadian tidak terjadi ketimpangan di antara keduanya, berada pada proporsinya masing-masing. Dengan demikian, kedudukan undang-undang tersebut tidak semata-mata hanya kesepakatan kerja bahkan lebih tinggi dari kesepakatan kerja maka kesepakatan kerja dalam bentuk apapun bisa batal apabila melanggar undang-

¹⁴ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 178

¹⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hal. 326.

¹⁶ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1999), hal. 72.

¹⁷ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hal. 20

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undang tersebut¹⁹. Ada beberapa beberapa aspek hukum Ketenagakerjaan dalam hubungan kerja (*during employment*) dua diantaranya adalah :

Pertama perlindungan norma kerja. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja yang berkaitan dengan norma-norma kerja yang meliputi (waktu kerja, mengaso, dan cuti atau istirahat, pembatasan pekerja anak dan wanita).

Kedua pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan yang di atur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan alat perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak mengalami hambatan-hambatan yang di sebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pengawasan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendidik agar pengusaha/perusahaan selalu tunduk untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena seringkali perselisihan ketenagakerjaan disebabkan karena majikan tidak memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Mengingat begitu besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari perlindungan tenaga kerja atau buruh, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun landasan, asas dan tujuan dikeluarkannya Undang-

¹⁹ *Ibid.*, hal.269.

²⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah pebanguna Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneesia Tahun 1945. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah²¹

Selanjutnya dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 4 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan diberlakukannya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atau buruh adalah untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.²²

Kesejahteraan adalah suatu kondisi aman sentosa dan makmur terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dirasakan seseorang yang telah /sedang melakukan pekerjaan disuatu tempat atau perusahaan. Pemikiran

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²² Adi Pranata Saputra, *Op.Cit.*, hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pertama tentang keselarasan hidup manusia dikemukakan oleh Aristoteles, pemikir Yunani pada abad IV SM, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia dapat memiliki arti dan berkembang.²³ Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan atau pegawai adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pemberian gaji atau upah yang adil.
2. Asuransi.
3. Melalui promosi atau kenaikan jenjang.
4. Pemberian fasilitas.
5. Kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik.
6. Memberikan penghargaan untuk mendorong kinerja.

Perlindungan hak-hak khusus bagi tenaga perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi telah menjadi salah satu isu yang cukup penting dalam gerakan serikat pekerja di Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh.²⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan payung sekaligus hukum positif bagi tenaga kerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, diantaranya:

²³ Harun Pujiarto, *Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Atma Jaya Press, 1999), hal.29

²⁴ *Ibid*, hal.4

²⁵ Elza Qorina Pangestika, "pengaturan hak menyusui anak", diakses dari <http://researchgate.net> > 3344.../, pada tanggal 17 September 2019 pukul 15.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
2. Pekerja wanita harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui bayinya pada jam kerja.
3. Pekerja wanita harus di berikan istirahat selama 1.5 bulan sebelum dan 1.5 bulan sesudah melahirkan.
4. Perpanjangan istirahat kepada tenaga kerja perempuan sebelum, pada saat melahirkan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, jika menurut keterangan dokter perlu menjaga kesehatannya.²⁶

Pembatasan dan larangan bagi tenaga kerja perempuan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas di maksudkan untuk melindungi tenaga kerja perempuan itu sendiri dari norma kesusilaan maupun untuk menjaga pisiknya karena secara kodrati fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki.

Terkhusus bagi pekerja perempuan yang sedang dalam menyusui anak di waktu pemberian ASI eksklusif, ini di atur dalam pasal 83 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa, “ Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.

Pentingnya penerapan peraturan terkait hak menyusui anak pada waktu kerja dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lain adalah untuk melindungi hak anak sebagai calon generasi penerus bangsa agar tetap mendapatkan asupan gizi yang berkualitas yang tidak

²⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tergantikan oleh produk makanan apapun, sehingga nantinya dapat menjadi generasi cerdas dan turut membangun bangsa dan negara di masa mendatang, meskipun dilakukan selama ibu bekerja.²⁷ Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk di perlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan ”keistimewaan” yang ada pada orang lain.²⁸

ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu saja selama enam bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain. Tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Air susu ibu adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Yang Maha Kuasa untuk memenuhi gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Air susu yang di produksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi, seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan mudah di cerna oleh bayi baru lahir.

PT Berlian Inti Mekar merupakan perusahaan kelapa sawit yang terletak di KM 68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. PT Berlian Inti Mekar mempekerjakan tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.

²⁷Elza Qorina Pangestika,”*pengaturan hak menyusui anak*”, diakses dari <http://researchgate.net> > 3344.../, pada tanggal 05 September 2019 pukul 19.50.

²⁸Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Keajaiban,2007), hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tertuju bagi tenaga kerja perempuan dengan adanya peraturan didalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa Pekerja/Buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Kemudian peraturan didalam pasal 128 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengatur bahwa (1) setiap bayi berhak mendapat air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas inidikasi medis. (2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan di tempat kerja dan sarana umum.²⁹ Fakta yang tampak, di PT Berlian Inti Mekar tidak menyediakan fasilitas khusus untuk keberlangsungan proses menyusui. Fasilitas khusus yang dimaksud disini diantaranya adalah Ruang Laktasi.

Keberadaan Ruang Laktasi di tempat kerja sangat di perlukan ibu menyusui untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, dikarenakan dengan di berikannya fasilitas menyusui, terbukti angka kehadiran di perusahaan tampak meningkat. Pekerja perempuan yang sekaligus seorang ibu menjadi tidak sering izin hanya karena menjaga bayi, bayi tumbuh dengan sehat sehingga ibu tidak harus izin untuk bekerja disebabkan bayi yang sakit.

²⁹ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun, pada kenyataannya di PT Berlian Inti Mekar tidak tersedia Ruang Laktasi sebagai fasilitas ibu menyusui.

Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang terkait, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan penjabaran serta keterangan yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi tentang Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian ASI Eksklusif Disaat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian air susu ibu eksklusif disaat jam kerja berdasarkan pasal 83 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa faktor penghambat penerapan hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian air susu ibu eksklusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti Mekar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaen Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian air sus ibu eksklusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti Mekar.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
2. Diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat maupun pengusaha agar mengetahui penerapan terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian ASI eksklusif disaat jam kerja.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Hak Tenaga Kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan pengamatan dan di lanjutkan dengan wawancara pada PT Berlian Inti Mekar tentang penerapan terhadap hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian ASI eksklusif disaat jam kerja.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai data yang di peroleh kemudian di analisa. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia , suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena masalah tersebut terjadi di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor ;Ghalia Indonesia, 2014), hal.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Subjek dan Objek Penelitian.

- Subjek Penelitian ini adalah PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- Objek penelitian ini adalah Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Asi Eksklusif disaat Jam Kerja.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama³¹, Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *Total Sampling*, yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sample

| NO | Nama | Populasi | Sample | Ket |
|----|--|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Tenaga Kerja Perempuan | 10 | 10 | 100% |
| 2 | Direktur PT.BIM | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kepala Bagian HUMAS PT.BIM | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Kepala Bagian HUMAS Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Siak | 1 | 1 | 100% |
| | Jumlah | 13 | 13 | 100% |

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan Observasi dan Wawancara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang – undangan dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Data Tersier yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk melihat secara jelas apa yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
- c. Studi Pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d. Studi Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Asi Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Berlian Inti Mekar, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus

G. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Hukum.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum, Sejarah Berdirinya PT Berlian Inti Mekar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Implementasi, Hak Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Perempuan, Tinjauan Umum ASI Eksklusif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang :

1. Implementasi Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
2. Hambatan Penerapan Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat Jam Kerja di PT Berlian Inti Mekar.

BAB V : PENUTUP

Berisi Kesimpulan Dan Saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buntan (salah satu desa yang ada di kecamatan Siak, kabupaten Siak) oleh raja kecil dari Pagaruyuang bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723.

Tidak lama setelah proklamasi di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak terakhir yang menyatakan kerajaanya bergabung dengan negara Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kabupaten Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak ibu kotanya Siak Sri Indrapura.³²

Sesuai kebijakan otonomi daerah, Kabupaten Siak terpisah dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Setelah berpisah, Siak kini berkembang menjadi daerah unggulan dengan beragam potensi di antaranya perkebunan,

³² Wikipedia, "Kabupaten Siak", diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_siak&ved, pada tanggal 4 November 2019 pukul 23.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan kawasan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua potensi ini sudah barang tentu memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan daerah.³³

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km². Terdapat padanya sungai yang di kenal dengan sebutan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Sungai Siak terkenal sebagai sungai yang terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 Desa. Kabupaten Siak terletak sekitar 130 km dari kota Pekanbaru, beberapa diantara potensi keunggulan Kabupaten Siak berupa minyak, perkebunan sawit dan karet. Khusus bagi perkebunan sawit Kabupaten Siak memiliki perkebunan sawit yang cukup luas.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

³³ Liputan6, "Kabupaten Siak Dengan Beragam Potensi", diakses dari <http://m.liputan6.com> pada tanggal 4 November 2019 pukul 23.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102 102⁰ 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis Kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Kondisi alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah Barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik tanah merah kuning dan batuan, alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Iklim dan Geologi

Iklim Kabupaten Siak pada umumnya suasana cuaca daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° – 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

B. Kondisi Sumber Daya Alam Kabupaten Siak

1. Sumber Daya Mineral

Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin. Diyakini minyak bumi tersebut merupakan migrasi dan formasi Bangko. Selain minyak bumi, gas juga ditemukan pada formasi Sihapas dan dalam jumlah yang besar ditemukan pada lapangan Libo dan Talas.

2. Sumber Daya Lahan

Lahan yang ada di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dari seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.³⁴

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini

³⁴ Geografi, “*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Siak*”, diakses dari <https://siakkab.go.id/geografi-siak/> pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 16.51

menempati satuan dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sungai Apit dan daerah Perawang.

C. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Siak

1. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri atas 238.837 jiwa penduduk laki-laki dan 226.577 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Siak mengalami pertumbuhan sebesar 2,73. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

Kepadatan Penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 373 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau sebesar 5 jiwa/Km².

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Dari jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2017 sebanyak 417.386 jiwa, yang telah menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 86.102 jiwa (20,63%), sedangkan yang telah menamatkan Perguruan Tinggi (PT) dengan ijazah Diploma I-IV/Strata I-III hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berjumlah 17.704 jiwa (4,24%). Dengan demikian penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan minimal SLTP/ sederajat atau yang lebih tinggi berjumlah 146.084 jiwa (35%). Sedangkan yang menyelesaikan tingkat pendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 62.319 jiwa (14,93%) dan SD/ sederajat sebanyak 83.765 jiwa (20,07%). Penduduk yang tidak/ belum sekolah atau belum tamat SD/ sederajat relatif besar yaitu 167.496 jiwa (40,13%).³⁵

3. Agama

Sarana peribadatan di Kabupaten Siak baik yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat terdiri dari mesjid, mushalla/ langgar, gereja, church, vihara, pura, dan kelenteng. Sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Siak, fasilitas sarana peribadatan agama islam seperti mesjid dan mushalla/ langgar lebih banyak daripada fasilitas sarana peribadatan agama lainnya.

D. Sejarah Singkat Kecamatan Dayun

Terbentuknya Kecamatan Dayun sebagai suatu wilayah peradaban yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, merupakan apresiasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mendekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

³⁵ Drs. H. Alfredri, "Laporan Kinerja Kabupaten Siak", diakses dari <http://kabupatenlestari.org> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 13.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Dayun yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Dayun yang kurang lebih jaraknya 21 km dari pusat pemerintahan siak yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Kecamatan Dayun merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu: Kecamatan Dayun, Kecamatan Tualang, Kecamatan Kerinci Kanan, Dan Kecamatan Siak yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada perda no. 13 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik di bandingkan dengan pemerintah yang lama.

Desa Dayun adalah salah satu Desa di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang merupakan Ibu kota Kecamatan Dayun, berjarak 18 km dari Ibu Kota Kabupaten Siak, berjarak 116 km dari Ibu Kota Propinsi Riau Pekanbaru. Desa Dayun terletak di dalam wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan :

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Merempan/Sei Mempura |
| Sebelah Timur | : Benteng Hulu/Sei Mempura |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Pelalawan |
| Sebelah Barat | : Desa Banjar Seminai/Pangkalan Makmur |

Luas wilayah Desa Dayun adalah 241.743 Ha dimana Geografi berupa daratan yang bertopografi Datar Sedang, dan 350 Ha daratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk Penyesuaian Iklim Desa Dayun, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Dayun Kecamatan Dayun.³⁶ Penduduk Desa Dayun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Dayun dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat

Desa Dayun adalah salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Dayun yang meruakan Desa tempat peneliti melakukan penelitian.

E. Sejarah Singkat PT Berlian Inti Mekar

PT Berlian Inti Mekar adalah perusahaan yang berdiri paa tahun 2012 bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

1. Visi & Misi

Visi perusahaan adalah menjadi salah satu perusahaan terbaik di dunia, yang mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. Misi perusahaan adalah menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan

³⁶ Dokumen Kantor Kepala Kampung Dayun, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul

dengan menerapkan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi dan sistem informasi yang handal serta struktur keuangan yang sehat.

2. Strategi Usaha

- a. Pengembangan usaha pengolahan minyak kelapa sawit
- b. Kerjasama strategi dengan mitra bisnis
- c. Peluang untuk melakukan akuisisi
- d. Meningkatkan efisiensi melalui operasional yang bermutu dan mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif
- e. Perseroan akan terus menjaga sistem operasional yang terbaik dengan memeperbarui SOP secara rutin.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kaaryawan dan mendorong karyawan dalam mengembangkan diri sebagai bagian dari investasi perusahaan
- g. Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staff dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan sumber daya manusia perseroan dan teknologi dalam pengembangan industry kelapa sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administatin aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)³⁷ A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. ³⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh

³⁷ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.

³⁸ A.Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: makalah pada Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, 1992), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan pembentuk undang-undang.³⁹ Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.⁴⁰

2. Konsep Negara Hukum

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, di antaranya Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal tentang pemikiran negara hukum.⁴¹ Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang diartikannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada “polis”.⁴² Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.⁴³ Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surabaya: makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994), hlm. 6.

⁴⁰ Ridwan HR, 2014, Loc.Cit.

⁴¹ SF Marbun et. al, *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

⁴² Moh.Kusnardi dan Harmmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980), hlm. 142

⁴³ Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asa Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal terbut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁴⁴ Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum. Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan.⁴⁵ Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memperhatikan realitas dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Bahkan lebih ekstrim lagi kita dapat melihat prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana beliau mengatakan bahwa pada hakekatnya negara identik dengan hukum, maka dari itu tertib hukum tidak ada bedanya dengan tertib negara. Hukum berlaku sovereign,

⁴⁴ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetamid Sadino*, (Jakarta: Pradja Paramita, 1983), hlm. 24.

⁴⁵ SF Marbun et.al., *Op.Cit.*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum berlaku objektif, terlepas dari pengakuan rakyat, terlepas dari penerimaan rakyat dan terlepas dari psychologische wortel. ⁴⁶Pandangan-pandangan Hans Kelsen di atas merupakan pandangan paling ekstrim dari beberapa pengikut paham kedaulatan hukum.

Unsur-Unsur Negara Hukum

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrich Julius Stahl) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

- a. Hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan.
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada.
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.

⁴⁶ Djokosutono, *Hukum Tata Negara, di himpun oleh Harun Alrasid*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusankeputusan pengadilan.⁴⁷

B. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau disusun untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.⁴⁸

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.⁴⁹

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), hlm. 311.

⁴⁸ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 237.

⁴⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini adalah beberapa penjabaran mengenai pengertian implementasi menurut pendapat para ahli.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah nerpuasa pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵⁰

Menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁵¹

Menurut Hanifah implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁵²

Dari pendapat para ahli di atas menyatakan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme memaparkan arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan suatu

⁵⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo 2002), hal.70.

⁵¹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 39.

⁵² Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya 2002), hal. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:⁵³

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

⁵³ Sabatier, Paul. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" (Journal of Public Policy 6, 1986), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

C. Teori Ketenagakerjaan

1. Pengertian Tenaga Kerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan /ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagi “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “Karyawan/Pegawai” (“White Collar”). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.⁵⁴

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta

⁵⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini di sebut dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah “barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”(pasal 1 ayat 1 a).⁵⁵

Istilah pekerja secara yuridis baru di temukan dalam Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya dengan pengertian tenaga kerja. Dalam Undang-undang ini di sebut bahwa pengertian tenaga kerja adalah “Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Dari pengertian ini jelaslah bahwa pengertian tenaga kerja sangat luas yakni mencakup semua penduduk dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Usia kerja dalam Undang-undang No. 25 tahun 1997 minimal berumur 15 tahun. Sedangkan pengertian pekerja adalah “tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah”. Jadi pekerja adalah sebagian dari tenaga kerja, dalam hal ini yang sudah mendapat pekerjaan.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar

⁵⁵ Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja menurut undang-undang ini meliputi “Tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di dalam hubungan kerja dengan alat produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Ciri khas dari hubungan di atas adalah ia bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah”.⁵⁶

Sedangkan dalam pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.⁵⁷

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan diatas, dengan sangat jelas dan menyebut secara detail bahwa tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan dan orang yang akan melakukan pekerjaan.

Seterusnya mengenai pengertian tenaga kerja, menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁵⁸ Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan

⁵⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 9.

⁵⁷ Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.⁵⁹

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.⁶⁰ Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.⁶¹ Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang

⁵⁹ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 7.

⁶⁰ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), hal. 08

⁶¹ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hal. 03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁶²

Dari beberapa pengertian yang terkait dapat disimpulkan bahwa, tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada pabrik atau suatu perusahaan untuk mendapatkan hasil pendapatan berupa gaji atau upah dari hasil produktivitas yang dilakukannya. Jika dilihat dari segi ekonomi, tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta dalam proses produksi dan menghasilkan barang dan jasa.⁶³

2. Hak Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai hak menjadi penting karena sangat berkaitan erat dengan posisi manusia terhadap negara dan dengan manusia sebagai subjek hukum. Hak yang diadopsi dari bahasa Arab “*haq*” memiliki musuh abadi, yaitu “*bathil*”. Haq berarti benar dan bathil berarti salah atau batal dari benar. Demikian pula dengan bahasa Inggris secara langsung hak disebut “*right*” yang berarti benar, memiliki musuh bebuyutan yaitu “*wrong*” yang berarti salah. Sementara dalam bahasa

⁶² Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal. 5.

⁶³ Poartadirejo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia hak tidak mempunyai musuh, hanya berpasangan dengan kewajiban atau keharusan saja.⁶⁴

Dalam bahasa latin istilah hak dan hukum memiliki istilah kesamaan kata, yaitu dalam kata “*ius*”. Tidak hanya itu dalam bahasa Jerman, “*Recht*,” dalam bahasa Belanda “*recht*,” dan dalam bahasa Perancis “*droit*” kesemuanya juga dapat diartikan hak dan dapat diartikan dengan “hukum.”⁶⁵

Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan dan meganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang cukup penting bahwa hak merupakan klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup.⁶⁶

Sementara menurut Theo Huijbers, dalam arti luas, Hak adalah berupa undangan, yakni dipanggil rasa kemurahan hati, belas kasihan, dan sebagainya. Umpamanya hak yang timbul atas dasar saling cinta. Sedangkan dalam arti sempit menurutnya hak adalah berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat. Umpamanya hak, bila seseorang tinggal dalam situasi bahaya.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 32.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 165.

⁶⁶ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 179.

⁶⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi H.L.A Hart, hak dalam arti modern itu baru bias timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia. Dalam pandangan Hart, keinsyafan akan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakuinya hak-haknya.⁶⁸

Sementara menurut Franz Magnis-Suseno, sesuatu menjadi hak saya, apabila saya dapat menuntut agar sesuatu itu diberikan kepada saya dan apabila orang lain wajib memberikan apa yang saya tuntut itu.⁶⁹

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.⁷⁰

Sumber dari segala hak yang dimiliki seseorang adalah konstitusi negaranya. Negara dibentuk oleh masyarakat melalui kontrak social untuk menjamin terjadinya kelangsungan ketertiban kehidupannya. Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang hidup bersama dalam

⁶⁸ K. Bertens, *op.cit.*, hal. 178.

⁶⁹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 72.

⁷⁰ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu wilayah tertentu. Individu adalah manusia yang memiliki hidup. Jadi sumber hak adalah hidup itu sendiri, karena setelah manusia mati, maka semua haknya lepas dari dirinya.⁷¹ Negara sebagai tempat lahir, tempat hidup dan mati manusia mengatur semua hak manusia yang hidup dalam negara itu melalui hukum yang berlaku di negara itu. Sistem hukum suatu negara menentukan hak-hak yang dimiliki setiap warga negaranya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁷²

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan

⁷¹ Muhammad Erwin, *op.cit.*, hal. 325.

⁷² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.⁷³

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan peranan tenaga kerja sebagai bagian penting dari pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan diperlakukannya peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, maka peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga mutlak diperlukan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁷⁴

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan kerja.⁷⁵ Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa

⁷³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), hal.

⁷⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dasar menimbang

⁷⁵ Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Moral dan kesusilaan; dan
 - d. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena di dalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung banyak aspek, misalnya; hukum, ekonomi maupun sosial. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja dari tempat kerja/ perusahaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan. Yang dimaksud dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan dan pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.⁷⁶

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat memperoleh haknya sebagai tenaga kerja yang dilindungi keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan tenaga kerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.⁷⁷

3. Hak Tenaga Kerja Perempuan

Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umumnya pemberian hak bagi perempuan sama

⁷⁶ Dr. Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 149.

⁷⁷ Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.⁷⁸

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja." Seterusnya mengenai pengertian tenaga kerja, menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁷⁹ Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tenaga kerja

⁷⁸ Rhona K. M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal.269.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan memiliki beberapa kekhususan yang mencerminkan hak-haknya yaitu:

1. Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

2. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan. Pekerja perempuan berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun bagi hak ini, keluarga pekerja wajib memberi kabar ke perusahaan mengenai kelahiran anaknya dalam tujuh hari setelah melahirkan serta wajib memberikan bukti kelahiran atau akta kelahiran kepada perusahaan dalam enam bulan setelah melahirkan.

3. Hak perlindungan selama masa kehamilan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh karena itu harus dihindarkan dari beban pekerjaan yang berlebih.

4. Hak cuti keguguran

Pekerja yang mengalami keguguran juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan dengan disertai surat keterangan dokter kandungan. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Hak untuk mendapatkan biaya persalinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000/bulan wajib mengikut sertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Salah satu program jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan biaya persalinan.

6. Hak untuk menyusui

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. menyatakan bahwa pekerja yang menyusui minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam kerja.

7. Hak cuti menstruasi

Banyak wanita yang masih belum mengetahui tentang hal ini. Namun kenyataannya setiap pegawai perempuan memiliki hak untuk cuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menstruasi pada hari pertama dan kedua periode haidnya. Hal ini tercantum dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan perlindungan tenaga kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan khusus pekerja/buruh perempuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan wanita/perempuan di malam hari diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi.
 - b. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi,
 - c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi wajib :
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi.
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi wajib menyediakan antar jemput.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuai dengan kodrat kewanitaannya, yaitu :
 - a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1)).
 - b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 ayat (1)).
 - c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 (2)).
 - d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83).
 - e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat upah penuh (Pasal 84).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Berlian Inti Mekar merupakan perusahaan yang mengistimewakan pentingnya kedisiplinan waktu demi lajunya kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Berlian Inti Mekar Kabupaten Siak mengenai Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemberian ASI Eksklusif di saat Jam Kerja belum terlaksana sepenuhnya, sebagaimana yang diatur didalam pasal 83 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Hambatan penerapan hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian air susu ibu eksklusif disaat jam kerja di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut.
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya kesadaran PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dalam pemberian hak tenaga kerja wanita.
 - 2) Keterbatasan ruang bangunan perusahaan dan lokasi pembangunan ruang laktasi.
 - 3) Minimnya jumlah tenaga kerja perempuan di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
 - 4) Kurangnya informasi, komunikasi dan pemahaman hukum oleh tenaga kerja perempuan di PT Berlian Inti Mekar di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya Pengawasan dan Sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Tidak adanya penegasan sanksi

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan kinerja organisasinya sehingga dapat mendeteksi secara dini tindakan-tindakan yang menyebabkan perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan tidak terlindungi dan tidak dipenuhi. Selain itu dinas ketenagakerjaan perlu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan ketenagakerjaan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pengetahuan tenaga kerja perempuan, sehingga pada akhirnya mereka tahu akan hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja perempuan.
2. Perusahaan diharapkan dapat memberikan waktu dan fasilitas yang sepenuhnya dapat melindungi hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disaat jam kerja. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan serta mensosialisasikan peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak tenaga kerja perempuan. Bagi tenaga kerja perempuan diharapkan agar lebih aktif lagi dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum, sehingga para tenaga kerja perempuan tahu akan hak dan kewajiban mereka serta merasa terlindungi sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agil Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1966)
- Al-Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, 1992)
- Al-Mahrus, SH, MH. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*,(Depok: Gramata Publishing, 2011)
- Apeldoorn L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1983)
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007)
- Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- Bertens, K, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Budiono Abdul Rahmad, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009)
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara, di himpun oleh Harun Alrasid*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Erwin Muhammad, S.H., M.Hum. *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- HR Ridwan, 2014, *Hukum Administasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kosasih Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia: Pustaka Utama, 2008)
- Koentjoro Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Kusnardi Moh. dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980),
- Magnis-Suseno Franz, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka, 1999)
- Manululang Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998)
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Marbun SF et. al, *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Midah Agus, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Muhammad Erwin, S.H.,M.Hum. *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada)
- M. Smith Rhona K, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)
- Nasution Johan Bahder DR., SH.,SM.,M.hum. *Negara Hukum dan Hak Asai Manusia* (Bandung : CV Mandar Maju, 2014)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Panjaitan ,Krismena Natalina, *Pembinaan Karier Ketenagakerjaan Dalam Perbankan*, (Semarang : Diponegoro, 2010)
- Poertadirejo, *Menajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Prastanto Pius A dan Al Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Purharto Harun, *Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Atma Jaya Press, 1999)
- Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011)
- Soedjono Wiwiho, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Sulisa Endang Dr. H., *Pembeerdayaan Ibu Menyusui Pada Program Asi EKslusif*, (Yogyakarta: UNISA, 2017)

Interntet

- Tagar News, "Perempuan Pekerja Usia Produktif Dilema Antara Bekerja Dan Menyusui Bayi", diakses pada tanggal 05 September 2019 pukul 20.49 dari <http://www.tagari.id/>
- Adi Pranata Saputra, " perlindungan Hukum Terhadap Buruh diPelabuhan Syngai Duku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan", diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 15.41 dari <http://Repository.uin-suska.ac.id>,
- Syja'i Ibnu, *hukum ketenagakerjaan atau perburuhan*, hal.1, di akses pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 00.27 dari <http://www.academia.edu/>
- Ela Qorina Pangestika, *pengaturan hak menyusui anak*, diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 15.18 dari <http://researchhggate.net> > 3344.../,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, *IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF DI SAAT JAM KERJA BERDASARKAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN* yang ditulis oleh :

Nama : **RENDY ERIANTO**
NIM : 11527102274
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M. Ag

Sekretaris

Joni Alizon, MH

Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II

Firdaus, SH., MH

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Rendy Erianto**
 NPM : **11527102274**
 Jurusan : **Ilmu Hukum**
 Judul : **Implementasi Hak Tenaga Kerja Perempuan dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Disaat Jam Kerja Berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)**

Pembimbing : **Joni Alizon, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



M. A. Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 November 2019

Un. 04/F.I/PP.00.9/9475/2019

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | |
|----------|--|
| Nama | :RENDY ERIANTO |
| NIM | :11527102274 |
| Jurusan | :Ilmu Hukum S1 |
| Semester | :IX (Sembilan) |
| Lokasi | :PT. Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Implementasi hak tenaga kerja perempuan dalam pemberian asi eksklusif disaat jam kerja
berdasarkan Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (studi kasus PT
Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cetakan Pertama
Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : 010/BIMS/III/2020
 Perihal : Balasan Permohonan Riset
 Lampiran : -
 Kepada : Sdr. Rendy Erianto

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28485 tanggal 01 Desember 2019 perihal Rekomendasi Riset, dengan ini disampaikan bahwa dapat kami perkenankan.

Mahasiswa yang akan melaksanakan riset adalah :

: RENDY ERIANTO
 : 11527102274
 : ILMU HUKUM
 : Implementasi hak tenaga kerja dalam pemberian asi eksklusif disaat jam kerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus PT. Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

telah kami setuju untuk mengambil data penelitian di perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi.

Penerimaan riset dan pengambilan data perusahaan harus mengikuti aturan perusahaan dan kaidah penulisan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Dayun, 27 Maret 2020)

PT. Berlian Inti Mekar

Risdiansyah Putra

(Mill Office Manager)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : 011/BIMS/III/2020
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
Lampiran : -
Kepada : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan Hormat,

Merujuk pada surat penerimaan riset yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020 dengan nomor : 010/BIMS/III/2020, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan keterangan di bawah ini:

: RENDY ERIANTO
 : 11527102274
 : ILMU HUKUM
 : Implementasi hak tenaga kerja dalam pemberian asi eksklusif disaat jam kerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus PT. Berlian Inti Mekar Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)

telah melakukan riset di perusahaan mulai tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

(Dayun, 30 Maret 2020)

PT. Berlian Inti Mekar

Risdiansyah Putra

(Mill Office Manager)

Office : Jl. Royal No. 88 C, Komp. Cemara Asri, Percut Sei Tuan - Deli Serdang
 Factory : - Dusun I Km. 14 RT 03 RW 01 Danau Rambai, Batang Gangsal - Indragiri Hulu
 - Jl. Raya Perawang Siak Km. 68, Dayun Dayun - Kabupaten Siak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/28485
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U00F.PP.00.9/475/2019 Tanggal 28 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **RENDY ERIANTO**
NIM / KTP : **11527102274**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DISAAT JAM KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 (STUDI KASUS DI PT. BERLIAN INTI MEKAR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK)**
Lokasi Penelitian : **PT. BERLIAN INTI MEKAR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. Berlian Inti Mekar di Kabupaten Siak
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **RENDY ERIANTO**. Lahir di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Juni 1996, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Saprianto dan Ibu Erita. Penulis sekarang bertempat di Bumi Rimbo Sejahtera Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 18 Kubang Pipik pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama serta Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang pada tahun 2008-2015.

Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kejaksaan Tinggi Bukittinggi. Dan pada tahun 2018 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Selama menempuh pendidikan di Universitas, penulis aktif di Organisasi dan Komunitas. Dan pada tanggal 03 Februari 2021 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI HAK KETENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DI SAAT JAM KERJA BERDASRKAN PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"**.